



TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI SERAYU BOGOWONTO

Jl. Solo Km.6 Yogyakarta, Telp (0274) 489172, Fax (0274) 489552, Email : tkpsda.bbwsso@gmail.com

LAPORAN TKPSDA WS SERAYU BOGOWONTO TAHUN 2017



KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2008 Pasal 16, TKPSDA WS Serayu Bogowonto dalam melaksanakan tugasnya harus menyampaikan laporan tertulis kepada Menteri paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dan penyampaian laporan dilakukan dengan tembusan kepada para gubernur dan bupati/walikota terkait. Laporan ini berupa ringkasan akhir dibuat sebagai wujud pertanggungjawaban kepada Menteri, karena TKPSDA WS Serayu Bogowonto sebagai TKPSDA WS Strategis Nasional berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri.

Laporan ini terdiri dari hasil kegiatan TKPSDA WS Serayu Bogowonto tahun anggaran 2017, permasalahan yang terjadi, solusi, serta rencana kegiatan tahun 2018 mendatang sesuai dengan sistematika yang telah ditentukan

Kami berharap, apa yang sudah dihasilkan sebagai hasil dari sidang TKPSDA WS Serayu Bogowonto yang berupa rekomendasi-rekomendasi dapat dijadikan sebagai masukan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terkait pengelolaan sumber daya air di WS Serayu Bogowonto.

Yogyakarta, Desember 2017
Ketua
TKPSDA WS Serayu Bogowonto

Ir. Sujarwanto Dwiatmoko, M.Si

NIP. 19651204 199203 1 012

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I. PENDAHULUAN	4
BAB II. KEGIATAN SEMESTER I TAHUN 2017.....	7
BAB III. MASALAH YANG DIHADAPI DALAM KEGIATAN PELAKSANAAN TKPSDA WS SERAYU BOGOWONTO	21
BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN	23
BAB V. PENUTUP	24

LAMPIRAN:

1. Dokumentasi Pelaksanaan Sidang TKPSDA WS Serayu Bogowonto
2. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 357/KPTS/M/2014 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Serayu Bogowonto;
3. Keputusan Ketua Harian TKPSDA WS Serayu Bogowonto Nomor 01/KPTS/KH.TKPSDA.WS.POS/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat TKPSDA WS Serayu Bogowonto;
4. Berita Acara Hasil dan Risalah Sidang I TKPSDA WS Serayu Bogowonto;
5. Berita Acara Hasil dan Risalah Sidang II TKPSDA WS Serayu Bogowonto;
6. Berita Acara Hasil dan Risalah Sidang III TKPSDA WS Serayu Bogowonto;
7. Berita Acara Hasil dan Risalah Sidang IV TKPSDA WS Serayu Bogowonto;
8. Berita Acara Hasil dan Risalah Sidang V TKPSDA WS Serayu Bogowonto;
9. Peraturan TKPSDA WS Serayu Bogowonto nomer 02/TKPSDA.WS.SB/VIII/2014 tentang Tata Tertib Persidangan dan Tata Cara Pengambilan Keputusan;
10. Rencana Kerja TKPSDA WS Serayu Bogowonto Tahun 2018;
11. Peta Wilayah Sungai Serayu Bogowonto.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 Tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Pembentukan Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Pada Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Wilayah Sungai;
6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 357/KPTS/M/2014 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Serayu Bogowonto;
7. Keputusan Ketua Harian TKPSDA WS Serayu Bogowonto Nomor 01/KPTS/KH.TKPSDA.WS.POS/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat TKPSDA WS Serayu Bogowonto;
8. Keputusan Ketua Harian TKPSDA WS Serayu Bogowonto Nomor 02/KPTS/KH.TKPSDA.WS.POS/2017 Tentang Perubahan I (Pertama) Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat TKPSDA WS Serayu Bogowonto;
9. Keputusan Ketua Harian TKPSDA WS Serayu Bogowonto Nomor 03/KPTS/KH.TKPSDA.WS.POS/2017 Tentang Perubahan II (Kedua) Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat TKPSDA WS Serayu Bogowonto;

10. Surat Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum Nomor : UM.02.06-DA/580 tanggal 22 Juni 2015 Perihal Pelaksanaan Kegiatan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

1.2. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04 /PRT/M/2008 Tentang Pedoman Pembentukan Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Wilayah Sungai Pasal 7 bahwa untuk melaksanakan koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai strategis nasional dapat dibentuk TKPSDA WS strategis nasional sesuai dengan intensitas kebutuhan pengelolaan sumber daya air. Intensitas kebutuhan pengelolaan sumber daya air antara lain meliputi:

- a. tingginya potensi konflik penggunaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- b. tidak seimbang antara ketersediaan air dan kebutuhan air;
- c. pesatnya laju pertumbuhan pembangunan pada wilayah sungai;
- d. persepsi antara para pihak pada pengelolaan SDA masih belum seragam;
- e. koordinasi dan keberlanjutan kegiatan pengelolaan SDA dalam konteks wilayah sungai belum berjalan baik.

TKPSDA WS Strategis Nasional bersifat nonstruktural, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri. TKPSDA WS strategis nasional mempunyai tugas membantu Menteri dalam koordinasi pengelolaan sumber daya air melalui:

- a. Pembahasan rancangan pola dan rancangan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai strategis nasional guna perumusan bahan pertimbangan untuk penetapan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air;
- b. Pembahasan rancangan program dan rancangan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai strategis nasional guna perumusan bahan pertimbangan untuk penetapan program dan rencana kegiatan sumber daya air;

- c. Pembahasan usulan rencana alokasi air dari setiap sumber air pada wilayah sungai strategis nasional guna perumusan bahan pertimbangan untuk penetapan rencana alokasi air;
- d. Pembahasan rencana pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi pada wilayah sungai strategis nasional untuk mencapai keterpaduan pengelolaan sistem informasi;
- e. Pembahasan rancangan pendayagunaan sumber daya manusia, keuangan,
- f. Pemberian pertimbangan kepada Menteri mengenai pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai strategis nasional.

Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, TKPSDA WS strategis nasional menyelenggarakan fungsi koordinasi melalui:

- a. konsultasi dengan pihak terkait yang diperlukan guna keterpaduan dalam pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai strategis nasional, serta tercapainya kesepakatan antar sektor, antar wilayah dan antar pemilik kepentingan;
- b. pengintegrasian dan penyelarasan kepentingan antarsektor, antarwilayah serta antarpemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai strategis nasional; dan
- c. kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai strategis nasional.

Dalam melaksanakan tugas, TKPSDA WS Startegis Nasional harus menyampaikan laporan tertulis kepada Menteri dengan tembusan kepada para gubernur dan bupati/walikota terkait.

BAB II

KEGIATAN TAHUN 2017

Mengacu pada program kerja TKPSDA WS Serayu Bogowonto Tahun 2017, maka kegiatan TKPSDA WS Serayu Bogowoto pada Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

A. Sidang I TKPSDA WS Serayu Bogowonto pada hari Selasa s/d Rabu, 26 s/d 27 April 2017 diselenggarakan di The Jayakarta Yogyakarta Hotel & Spa Yogyakarta. Subtansi permasalahan yang dibahas adalah:

1. Evaluasi Kehadiran dan keaktifan Anggota TKPSDA WS Serayu Bogowonto Tahun 2016;
2. Pembahasan Kegiatan Pengelolaan SDA Tahun 2017;
3. Rencana Alokasi Air DAS Serayu;
4. Modernisasi Pertanian Untuk Menunjang Kedaulatan Pangan.

Hasil Rekomendasi Sidang I TKPSDA WS Serayu Bogowonto:

No.	Menteri	Gubernur	Bupati
1.	Membuat program saluran air baku tersendiri dari Bendung Gerak Serayu ke Water Treatment Plan (WTP). Dari Maos 80 lt/det dan di Kesugihan 550 lt/det dari rencana pengambilan 1300 lt/det.		Membuat usulan adanya saluran air baku tersendiri dari Bendung Gerak Serayu ke Water Treatment Plan (WTP). Dari Maos 80 lt/det dan di Kesugihan 550 lt/det dari rencana pengambilan 1300 lt/det.

2.	Membentuk Tim Alokasi Air terpadu.	Membentuk Tim Alokasi Air terpadu.	Membentuk Tim Alokasi Air terpadu.
3.		Pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah.	Pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah.
4.	Mendorong Kementerian PUPR melaksanakan normalisasi sungai di bagian hilir dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian BUMN melakukan rehabilitasi di kawasan hutan negara yang dikelola oleh Perhutani	Gubernur membuat usulan kepada Menteri PUPR untuk melaksanakan normalisasi sungai di bagian hilir dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian BUMN melakukan rehabilitasi di kawasan hutan negara yang dikelola oleh Perhutani.	Bupati membuat usulan kepada Menteri PUPR untuk melaksanakan normalisasi sungai di bagian hilir dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian BUMN melakukan rehabilitasi di kawasan hutan negara yang dikelola oleh Perhutani.
5.		Meningkatkan pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum berdasarkan Perda RTRW melalui peningkatan kualitas dan kuantitas SDM.	Meningkatkan pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum berdasarkan Perda RTRW melalui peningkatan kualitas dan kuantitas SDM.

6.	Dalam implementasinya agar melibatkan pemerintah daerah kabupaten/kota.	Dalam implementasinya agar melibatkan pemerintah daerah kabupaten/kota.	
7.	Kerusakan Jembatan Pelayanan DI Boro agar menjadi prioritas perbaikan (dibongkar/direhab).		
8.	Kerusakan Jaringan Irigasi di Crossdrain Wadaslintang agar menjadi prioritas Perbaikan.		
9.	Waktu pelaksanaan kegiatan rehabilitasi saluran Irigasi pada WS Serayu Bogowonto agar kesepakatannya dalam rapat dilaksanakan.		

B. Sidang II TKPSDA WS Serayu Bogowonto pada hari Kamis s.d Jum'at, 13 s.d 14 Juli 2017 diselenggarakan di Kresna Hotel Wonosobo. Subtansi permasalahan yang dibahas adalah:

1. Pola Operasi Waduk Wadaslintang.
2. Kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau tahun 2017;
3. Rencana Alokasi Air DAS Serayu;
4. Pengelolaan SIH3 WS Serayu Bogowonto (lanjutan).

Hasil Rekomendasi Sidang II TKPSDA WS Serayu Bogowonto:

No.	Menteri	Gubernur	Bupati
1.	<ul style="list-style-type: none"> - Mendorong inventarisasi dan mitigasi kerusakan sungai di WS Serayu Bogowonto secara periodik - Mendorong Pemerintah untuk menyediakan anggaran darurat yang memadai untuk penanganan kejadian longsor pada sungai di WS Serayu bogowonto 	<p>Mendorong untuk melakukan komunikasi dengan Pemerintah Pusat dalam penanganan sungai</p>	<p>Mendorong pemerintah daerah untuk memberikan sosialisasi berkaitan dengan larangan mendirikan bangunan permanen di daerah sempadan sungai</p>
2.	<ul style="list-style-type: none"> - Perlu dibangun Bangunan Pengendali Sedimen di daerah hulu - Mendorong deregulasi tanaman pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan koordinasi dalam rangka pengendalian sedimen - Pola Pengaturan lahan dan komoditas pertanian 	<p>Membantu terlaksananya sosialisasi dalam rangka mempercepat pembangunan Bangunan Pengendali Sedimen (BPS)</p>

3.	Pemerintah pusat menyusun regulasi yang lebih jelas tentang mata air (Konservasi, Pengendalian Daya Rusak dan Pendayagunaan Sumber Daya Air)	Menginventarisasi potensi sumber mata air	Menginventarisasi potensi sumber mata air
4.	1. Memperkuat pemberian rekomendasi teknis pengendalian di Sungai Serayu berkaitan dengan aktivitas penambangan 2. Mencari bentuk reklamasi yang tepat untuk pasca tambang	Memberikan edukasi dan penguatan Sumber Daya Manusia di sepanjang sungai	Fasilitasi pembentukan komunitas sungai yang sadar lingkungan
5.	Revitalisasi/rekondisi peralatan pengukur debit air	Revitalisasi/rekondisi peralatan pengukur debit air	Revitalisasi/rekondisi peralatan pengukur debit air
6.	Rekondisi pintu air		
7.	Sosialisasi tentang pola tanam sesuai SK Bupati, pada D.I. yang sesuai kewenangannya	Sosialisasi tentang pola tanam sesuai SK Bupati, pada D.I. yang sesuai kewenangannya	Sosialisasi tentang pola tanam sesuai SK Bupati, pada D.I. yang sesuai kewenangannya

8.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengerukan pada kantong lumpur di hulu intake 2. Konservasi pada Hulu DAS Serayu 	Konservasi pada Hulu DAS Serayu	Konservasi pada Hulu DAS Serayu
9.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penertiban pengambilan air untuk budidaya ikan 2. Rekayasa pengelolaan air irigasi dan air buangan dari kolam kembali ke saluran irigasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penertiban pengambilan air untuk budidaya ikan 2. Rekayasa pengelolaan air irigasi dan air buangan dari kolam kembali ke saluran irigasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penertiban pengambilan air untuk budidaya ikan 2. Rekayasa pengelolaan air irigasi dan air buangan dari kolam kembali ke saluran irigasi
10.	Upaya pengurangan sedimentasi dilaksanakan ketika musim kemarau	Upaya pengurangan sedimentasi dilaksanakan ketika musim kemarau	Upaya pengurangan sedimentasi dilaksanakan ketika musim kemarau
11.	Menyusun regulasi tentang pengaturan yang ketat alih fungsi lahan	Melaksanakan regulasi tentang pengaturan yang ketat alih fungsi lahan	Melaksanakan regulasi tentang pengaturan yang ketat alih fungsi lahan
12.	Perlu kajian pembangunan embung/tampungan dengan kapasitas kecil secara serial dengan pola operasi tampungan yang saling berhubungan	Perlu kajian pembangunan embung/tampungan dengan kapasitas kecil secara serial dengan pola operasi tampungan yang saling berhubungan	Perlu kajian pembangunan embung/tampungan dengan kapasitas kecil secara serial dengan pola operasi tampungan yang saling berhubungan

13.	Personil yang diberi tugas untuk menangani masalah penambangan galian C/mineral nonlogam harus ahli/bidang sumber daya air	<ul style="list-style-type: none"> • Personil yang diberi tugas untuk menangani masalah penambangan galian C/mineral nonlogam harus ahli/bidang sumber daya air • Memperketat perizinan, bisa dengan pembatasan luasan galian • Peninjauan ulang regulasi yang sudah ada terkait penambangan, terutama tentang luasan galian, pelaksanaan pemantauan 	
14.	Kaji ulang alokasi air hingga level sub DAS (anak sungai)	Kaji ulang alokasi air hingga level sub DAS (anak sungai)	

C. Sidang III TKPSDA WS Serayu Bogowonto pada hari Selasa s.d Rabu, 12 s.d 13 September 2017 diselenggarakan di The Jayakarta Hotel Yogyakarta. Subtansi permasalahan yang dibahas adalah :

1. Penguatan Kelembagaan Terhadap P3A, GP3A dan IP3A;
2. Identifikasi dan Pemetaan Lokasi Pencemaran Air di WS Serayu Bogowonto (lanjutan);
3. Operasi dan Pemeliharaan Sungai serta Permasalahannya di WS Serayu Bogowonto;
4. Alokasi Air DAS Serayu.

Hasil Rekomendasi Sidang III TKPSDA WS Serayu Bogowonto:

No.	Menteri	Gubernur	Bupati
1.	Mendorong Menteri untuk segera menetapkan alokasi air (Rencana Alokasi Air Tahunan).		
2.	Mendorong dilakukan penertiban dan penerbitan ijin SIPPA di kawasan Telaga Merdada Dieng berdasarkan kewenangannya		
3.		Penegakan Perda tentang Pembuangan Sampah	Penegakan Perda tentang Pembuangan Sampah
4.	Mendorong untuk dibangunnya intake PDAM Kabupaten Cilacap langsung dari hulu Bendung Gerak Serayu		
5.	Mendorong dilakukannya Pemeliharaan rutin berupa pengerukan	Mendorong dilakukannya Pemeliharaan rutin berupa pengerukan muara sungai sesuai kewenangannya	Mendorong dilakukannya Pemeliharaan rutin berupa pengerukan muara sungai sesuai kewenangannya

	muara sungai sesuai kewenangannya		
6.	Perlu adanya MOU atau KSO antara Kementerian dan Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kab/kota	Perlu adanya MOU atau KSO antara Kementerian dan Pemerintah Provinsi	Perlu adanya MOU atau KSO antara Kementerian dan Pemerintah Kabupaten/Kota
7.	Penegakan Peraturan Sempadan Sungai sesuai kewenangannya	Penegakan Peraturan Sempadan Sungai sesuai kewenangannya	Penegakan Peraturan Sempadan Sungai sesuai kewenangannya
8.	Dipenuhinya Tenaga Pengamat Sungai sesuai kewenangannya	Mendorong Dipenuhinya Tenaga Pengamat Sungai sesuai kewenangannya	Mendorong Dipenuhinya Tenaga Pengamat Sungai sesuai kewenangannya
9.	Mendorong ditetapkannya hasil Audit Teknis dan Aknop Sungai		
10.	Diterbitkannya Manual OP Sungai sesuai kewenangannya	Mendorong diterbitkannya Manual OP Sungai sesuai kewenangannya	Mendorong diterbitkannya Manual OP Sungai sesuai kewenangannya
11.	Mendorong kepada pemerintah untuk melakukan kegiatan konservasi di daerah DAS Hulu secara berkesinambungan	Mendorong kepada pemerintah untuk melakukan kegiatan konservasi di daerah DAS Hulu secara berkesinambungan dengan	Mendorong kepada pemerintah untuk melakukan kegiatan konservasi di daerah DAS Hulu secara berkesinambungan dengan melibatkan semua stakeholder

	dengan melibatkan semua stakeholder	melibatkan semua stakeholder	
12.	<ul style="list-style-type: none"> - Pemerintah pusat menyusun regulasi yang lebih jelas tentang sempadan sungai - Deregulasi proses perijinan galian Mineral Batuan - Kaji ulang prosedur dan administrasi persyaratan terkait ijin penambangan galian Mineral Batuan 	<ul style="list-style-type: none"> - Perlunya pengendalian dan penegakan hukum - Deregulasi proses perijinan galian Mineral Batuan - Kaji ulang prosedur dan administrasi persyaratan terkait ijin penambangan galian Mineral Batuan 	<ul style="list-style-type: none"> - Memfasilitasi berubahnya masyarakat dari galian Mineral Batuan - Sosialisasi dan edukasi terkait penambangan galian Mineral Batuan - Kaji ulang penentuan kawasan pertambangan pada RTRW
13.	Pengawasan, pengendalian dan monitoring terhadap pencemaran dan langkah pencegahannya sesuai kewenangannya	Pengawasan, pengendalian dan monitoring terhadap pencemaran dan langkah pencegahannya sesuai kewenangannya	Sosialisasi penggunaan dan pemanfaatan air yang sesuai regulasi sesuai kewenangannya
14.	Melakukan pemetaan terkait kualitas air guna langkah teknis kegiatan konservasi sesuai kewenangannya	Melakukan pemetaan terkait kualitas air guna langkah teknis kegiatan konservasi sesuai kewenangannya	Melakukan pemetaan terkait kualitas air guna langkah teknis kegiatan konservasi sesuai kewenangannya

D. Sidang IV TKPSDA WS Serayu Bogowonto pada hari Rabu s.d Kamis, 11 s.d 12 Oktober 2017 diselenggarakan di Sahid Jaya Hotel & Convention Yogyakarta.

Subtansi permasalahan yang dibahas adalah

1. Modernisasi irigasi di WS Serayu Bogowonto;
2. Sinkronisasi usulan program dan kegiatan SDA tahun 2018;
3. Antisipasi menghadapi musim penghujan dari bencana banjir dan tanah longsor Tahun 2017/2018.

Hasil Rekomendasi Sidang III TKPSDA WS Serayu Bogowonto:

No.	Menteri	Gubernur	Bupati
1.	Perlu penanganan lebih lanjut di DI Tajum		
2.	Perlu penanganan perbaikan tebing di Sungai Tajum Desa Gentawangi, Kec. Jati Lawang dan tebing Sungai Luk Ulo Desa Kutosari, Kab. Kebumen.		
3.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu penanganan lebih lanjut di DI Serayu 2. Perlu penanganan lebih lanjut DI Kedungsamak, saluran sekunder Sentul dan saluran sekunder Kebumen 		

	Selatan DI Kaligending dan Bendung Kaligending		
4.	Perlu dilakukan uji alir saluran di Saluran Sekunder Jepara, Saluran Sekunder Karangmangu DI Serayu		
5.	Perlu penanganan perbaikan tebing di Sungai Serayu di Desa Maos Kidul, Karang Rena, Karang Sari, Gombolharjo		
6.	Pemasangan kembali patok-patok batas DI Banjarcayana dan DI Serayu dalam rangka pengamanan aset		
7.	Perbaikan jalan inspeksi Saluran Irigasi Banjarcayana		
8.	Perlu perijinan penggunaan air untuk perikanan agar tidak berbenturan dengan	Perlu perijinan penggunaan air untuk perikanan agar tidak berbenturan dengan kebutuhan air irigasi DI.Banjarcayana	Perlu perijinan penggunaan air untuk perikanan agar tidak berbenturan dengan kebutuhan air irigasi DI.Banjarcayana

	kebutuhan air irigasi DI.Banjarcayana		
9.	Bantuan/bimbingan teknis untuk pembuatan peta rawan banjir secara detail serta rekayasa penanganan jangka panjang, menengah dan pendek.	Bantuan teknis untuk pembuatan peta rawan bencana tanah longsor dan banjir secara detail serta rekayasa penanganan jangka panjang, menengah dan pendek.	Penyusunan peta detail daerah rawan bencana tanah longsor dan banjir serta rekayasa penanganan jangka panjang, menengah dan pendek.
10.		Fasilitasi dan pendampingan teknis pembuatan rencana kontinjensi bencana banjir dan tanah longsor di WS Serayu Bogowonto.	Penyusunan rencana kontinjensi bencana banjir dan tanah longsor di WS Serayu Bogowonto.
11.	Memberikan arahan agar pembangunan/OP sarana dan prasarana diselesaikan sebelum musim hujan.	Pelaksanaan pembangunan/OP sarana dan prasarana diselesaikan sebelum musim hujan.	Pelaksanaan pembangunan/OP sarana dan prasarana diselesaikan sebelum musim hujan.
12.	Mendorong kementerian PUPR, LHK dan Pertanian untuk melakukan aksi komprehensif dalam penanganan di hulu DAS Serayu, DAS Wawar, DAS Bogowonto	Mendorong SKPD terkait untuk melakukan aksi komprehensif dalam penanganan di hulu DAS Serayu, DAS Wawar, DAS Bogowonto	1. Mendorong SKPD terkait untuk melakukan aksi komprehensif dalam penanganan di hulu DAS Serayu, DAS Wawar, DAS Bogowonto. 2. Sosialisasi Perda RTRW berkaitan dengan

			peruntukan lahan kepada masyarakat
13.	Meninjau kembali tentang pelarangan penggunaan mesin sedot pada pemilik IUP Mineral bukan Logam dan Batuan (Penambangan di Sungai)	Melakukan Pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan mesin sedot untuk penambangan di sungai	Melakukan Pengawasan dan pemantauan terhadap pengendalian penggunaan mesin sedot untuk penambangan di sungai

E. Pada hari ini, **Senin** tanggal **Dua puluh** bulan **November** tahun **Dua Ribu Tujuh Belas** diselenggarakan di Jayakarta Hotel & Spa Yogyakarta, dilaksanakan Sidang Ke V TKPSDA WS Serayu Bogowonto dipimpin oleh Ketua dan Ketua Harian TKPSDA WS Serayu Bogowonto dengan pokok bahasan sidang sebagai berikut:

1. Laporan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air di Jawa Tengah (khususnya di WS Serayu Bogowonto);
2. Kebijakan RPSDA dalam Pengelolaan Sumber Daya Air di WS Serayu Bogowonto;
3. Penyusunan Rencana Kerja TKPSDA WS Serayu Bogowonto Tahun 2018.

Dalam pembahasan Rencana Kerja tersebut telah disepakati Rencana Kerja TKPSDA WS Serayu Bogowonto tahun 2018 terlampir yang menjadi satu kesatuan dengan Berita Acara ini.

BAB III

MASALAH YANG DIHADAPI DALAM KEGIATAN PELAKSANAAN TKPSDA WS SERAYU BOGOWONTO

3.1. Permasalahan TKPSDA

1. Jadwal yang diagendakan pelaksanaannya mundur karena kesulitan melakukan koordinasi antar instansi terkait. Permasalahan utama dalam koordinasi ini adalah dalam penentuan jadwal, mengingat tingkat kesibukan ketua dan ketua harian yang menjabat pada masing-masing instansi tersebut.
2. Materi sidang TKPSDA Wilayah Sungai Serayu Bogowonto ini disesuaikan dengan agenda yang sudah ditetapkan pada rencana kerja tahunan, berdasarkan kesepakatan semua anggota TKPSDA Wilayah Sungai Serayu Bogowonto.
3. Keanggotaan TKPSDA Wilayah Sungai Serayu Bogowonto berkaitan dengan keaktifan dan kehadiran masing-masing anggota yang kurang aktif dan sering kali tidak kontinyu (melainkan orang berganti sebagai wakil/anggota pada setiap kali sidang). Hal ini terjadi khususnya pada anggota dari instansi pemerintah.
4. Anggota dari unsur non pemerintah umumnya melekat dalam salah satu jabatan yang dijabat oleh yang bersangkutan di organisasinya (misal ketua atau sekretaris), dengan pengetahuan dan kompetensi yang minim di bidang sumber daya air sehingga kurang dapat memberikan kontribusi yang optimal.
5. Pembahasan permasalahan pada sidang TKPSDA terkadang belum mengacu pada Tugas dan Fungsi TKPSDA sesuai Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 357/KPTS/M/2014 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Serayu Bogowonto, sehingga tugas dan fungsi TKPSDA belum berjalan secara optimal.
6. Pembahasan permasalahan pada sidang TKPSDA masih seputaran permasalahan yang umum dan aktual yang terjadi (sektoral)
7. Kurangnya tingkat kehadiran yang belum memenuhi harapan pada setiap kali persidangan.

8. Keaktifan tiap anggota yang masih kurang dalam setiap pembahasan permasalahan pada sidang TKPSDA.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

Solusi yang disarankan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada antara lain:

1. Ketua, ketua harian dan anggota TKPSDA masih belum merasa memiliki wadah koordinasi TKPSDA, kontribusi setiap rekomendasi TKPSDA yang dihasilkan belum mendapatkan tindaklanjut yang nyata. Diperlukan tindaklanjut pemrograman anggaran terkait rekomendasi TKPSDA tersebut.
2. Pembahasan permasalahan pada sidang TKPSDA terkadang belum mengacu pada Tugas dan Fungsi TKPSDA (sesuai Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 357/KPTS/M/2014 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Serayu Bogowonto). Pembahasan yang menjadi fokus terkadang adalah permasalahan aktual sektoral sebagai mengkesampingkan tugas dan fungsi. Tugas dan fungsi harus tetap dibahas, sedangkan isu aktual sektoral yang strategis menjadi tambahan agenda.
3. Kehadiran masing-masing anggota (khususnya dari instansi pemerintah), hendaknya bersifat kontinyu dan orang yang sama, sehingga diharapkan dapat mengikuti permasalahan yang ada di TKPSDA tersebut.
4. Untuk meningkatkan kehadiran anggota pada sidang, sekretariat akan menghubungi melalui surat, Faximile, telepon, SMS dan email.

BAB V

PENUTUP

Demikian laporan Tahun 2017 Kegiatan TKPSDA WS Serayu Bogowonto, kami mengharapkan sumbang saran yang bersifat membangun demi perbaikan pada kesekretariatan maupun pada pelaksanaan sidang dapat terus berjalan semakin baik, sehingga TKPSDA WS Serayu Bogowonto semakin maju dan dapat memberikan kontribusi dalam pengelolaan sumber daya air di WS Serayu Bogowonto.

I. DOKUMENTASI SIDANG I TKPSDA WS SERAYU BOGOWONTO



SIDANG I TKPSDA WS SERAYU BOGOWONTO



SIDANG KOMISI TKPSDA WS SERAYU BOGOWONTO



II. DOKUMENTASI SIDANG II TKPSDA WS SERAYU BOGOWONTO



SIDANG II TKPSDA WS SERAYU BOGOWONTO



TANYA JAWAB SIDANG II TKPSDA WS SERAYU BOGOWONTO



SIDANG KOMISI TKPSDA WS SERAYU BOGOWONTO



III. DOKUMENTASI SIDANG III TKPSDA WS SERAYU BOGOWONTO



SIDANG III TKPSDA WS SERAYU BOGOWONTO



TANYA JAWAB TKPSDA WS SERAYU BOGOWONTO



SIDANG KOMISI TKPSDA WS SERAYU BOGOWONTO



IV. DOKUMENTASI SIDANG IV TKPSDA WS SERAYU BOGOWONTO



SIDANG IV TKPSDA WS SERAYU BOGOWONTO



SIDANG KOMISI TKPSDA WS SERAYU BOGOWONTO



TANYA JAWAB TKPSDA WS SERAYU BOGOWONTO



I. DOKUMENTASI SIDANG V TKPSDA WS SERAYU BOGOWONTO



SIDANG V TKPSDA WS SERAYU BOGOWONTO



TANYA JAWAB TKPSDA WS SERAYU BOGOWONTO

